

POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Portrait of Gender Responsive Budget in Addressing Poverty in Sidenreng Rappang District

Trian Fsiman Adisaputra¹

Email: trian260691@gmail.com

Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare 1
Jl. Amal Bakti No.8,Parepare 1

Agung Sutrisno²

Email: agungpiyusutrisno@gmail.com

Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare 1
Jl. Amal Bakti No.8,Parepare 1

Adnan Ramadha³

Email: adnanramadhan@gmail.com

Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare 1
Jl. Amal Bakti No.8,Parepare 1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena anggaran responsive gender dalam penanggulangan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan penyusun anggaran pada Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng. Hasil wawancara dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen-komponen dalam sikap birokrasi yaitu (1) komponen kognitif mengacu pada pemahaman, pengetahuan, kepercayaan aparatur terhadap anggaran responsive gender, (2) komponen efektif mengacu pada sikap aparatur pada anggaran responsive gender, (3) dan komponen behavior mengacu pada predisposisi aparatur terhadap anggaran responsive gender dalam bertindak. Hasil penilaian menunjukkan bahwa dominasi fakta social material menjadi stimulus utama dalam melakukan penerapan anggaran responsive gender.

Kata Kunci: Anggaran Responsif Gender; komopen kognitif; afektif; bihavior.

ABSTRACT

This study aims to determine the phenomenon of gender responsive budgeting in poverty alleviation. Data collection techniques were carried out by interviewing budget preparers at the Office of Cooperatives, SMEs, Labor and Transmigration in Sidenreng Regency. The results of the interviews were analyzed using a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the study show that the components in the attitude of the bureaucracy are (1) the cognitive component refers to the understanding, knowledge, trust of the apparatus towards gender responsive budgeting, (2) the effective component refers to the attitude of the apparatus towards gender responsive budgeting, (3)

and the behavior component refers to on the apparatus predisposition to gender responsive budgeting in action. The results of the assessment show that the dominance of material social facts is the main stimulus in implementing gender responsive budgeting.

Keywords: Gender Responsive Budget; cognitive component; affective; behavior.

PENDAHULUAN

Berkembangnya system sosial patriarki, yang lebih mengutamakan kalangan pria, menyebabkan kalangan wanita tidak diuntungkan dalam kehidupan sosialnya. Wanita dihadapkan pada beban kerja yang berlebih karena telah mendapatkan justifikasi sosial bahwa tugas produksi dalam rumah tangga dibebankan ke wanita (Fakih, 2013). Pekerjaan yang berlebihan pada wanita menyebabkan wanita susah memperoleh akses serta partisipasinya dalam pembangunan, sehingga menyebabkan kalangan wanita terus menjadi miskin.

United Nations Development Programme pada tahun 2003 telah menjadikan kemiskinan pada rumah tangga sebagai subjek kritiknya. Wanita yang terlahir dalam keluarga yang kaya belum tentu memperoleh kesempatan dalam menikmati kekayaan keluarganya yang pada akhirnya menciptakan kondisi tidak seimbang bagi wanita. Ketimpangan gender diakibatkan oleh kekerasan, justifikasi negatif, porsi beban dan waktu kerja yang lebih banyak, kurangnya akses dalam keputusan politik, serta proses pemiskinan ekonomi (Fakih, 2013).

Responsif gender dan kebijakan fiskal yang berpihak pada Wanita dibutuhkan dalam mengatasi fenomena kemiskinan dan ketimpangan yang membelenggu wanita. Pengukuran tentang fiskal mempunyai dampak berbeda pada pria serta wanita, sehingga anggaran yang tidak memperhatikan keadilan gender menyebabkan timbulnya masalah kebutaan gender dalam penganggaran (Syarifuddin, 2016). Saran agar mempraktikkan anggaran yang responsif gender telah dilakukan pada konferensi dunia keempat, tujuannya adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan keadilan pada sektor politik untuk gender.

Anggaran responsif gender ialah cara dalam memperhitungkan serta menyesuaikan tahapan dalam kebijakan belanja sehingga pengeluaran serta pemasukan mencerminkan perbedaan yang berkeimbangan antara wanita serta pria dalam mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab di ranah social, serta dalam hal pemenuhan kebutuhan (Elson, 2008). Perubahan yang dimaksud yakni revisi pengeluaran serta pemasukan pemerintah

disertai membagikan aturan atau petunjuk tentang pemberdayaan Wanita dan kesetaraan gender yang lahir dari analisis anggaran responsif gender.

Penelitian tentang anggaran yang responsif gender di kementerian ketenagakerjaan pernah dilakukan oleh South Africa Women Budgeting Initiative (SAWBI) pada tahun 2000. Hasil dari pengamatannya yakni anggaran responsif gender yang diterapkan sudah memberikan sumbangsih dalam kurangi pengangguran wanita di Afrika Selatan. Tetapi, kelas ekonomi rendah dari pekerja Afrika Selatan khususnya Wanita tidak mengalami perubahan yang mencolok. Perihal ini disebabkan tidak sedikit aspek yang bersumber dari lahirnya keputusan ekonomi di luar dari kementerian ketenagakerjaan yang seharusnya bertindak sebagai sentral kebijakan terkait ekonomi.

Ditahun berikutnya, SAWBI kembali meneliti sisi pemasukan yang bersumber dari kementerian ketenagakerjaan Afrika Selatan. Penentuan tarif pada bursa tenaga kerja yang diikuti dengan pajak terhadap pekerja menjadi esensi analisisnya. Konsen studinya yakni pengaruh penetapan gaji pekerja wanita dengan pekerjaan yang beragam. Hasil studi ini menampilkan aturan pungutan yang ditetapkan kementerian tenaga kerja mempunyai berpengaruh negatif yang diakibatkan oleh kebijakan serta aktifitas perniagaan. Dalam permasalahan ini, anggaran yang responsif gender bisa menjadi metode analisis untuk membela hak-hak Wanita dalam ranah pengambilan keputusan dibidang anggaran.

Anggaran yang responsif gender bisa menumbuhkan kesetaraan serta keadilan gender untuk mengatasi kemiskinan (Syarifuddin, 2016). Anggaran yang responsif gender berupaya meningkatkan nilai alternatif serta memperjuangkan kebutuhan sosial- ekonomi wanita miskin, sediakan perlengkapan dalam memantau pengeluaran serta memberdayakan pemerintah, mendayakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penganggaran responsif gender, serta melibatkan warga sipil ikut serta dalam dialog tentang masalah-masalah yang mereka hadapi.

Secara universal, fenomena pembangunan yang berdasarkan kesetaraan gender bisa dikenal lewat Gender Development Index (GDI) ataupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Human Development Index (HDI) ataupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2010). Departemen Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak (KPPPA) menyampaikan secara resmi IPG Indonesia tahun 2018 berada pa tingkat 91, 06 % disisi lain IPM pria 73,65 % serta IPM wanita 69,04% dari keseluruhan IPM Indonesia 71,82%. Informasi tersebut memperlihatkan masih terdapatnya selisih yang besar antara kalangan pria dengan kalangan wanita dalam kegiatan pembangunan Indonesia.

Gejala kemiskinan wanita di Indonesia bisa ditafsirkan pada pengalangan perkapita kalangan wanita dibanding kalangan pria. Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak (KPPPA) melaporkan pengeluaran perkapita pertahun wanita di tahun 2017 secara rata-rata sebesar 8.862 ribu rupiah, sebaliknya rata-rata pengeluaran perkapita pertahun pria berada pada angka 14.932 ribu rupiah. Pemicu terbentuknya kesenjangan ini adalah tingkatan dari jumlah keseluruhan Wanita yang masih tidak bekerja dibandingkan pria yang lebih banyak mengisi ruang pekerjaan. Tingkat Wanita yang bekerja di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 51,87 persen serta tingkat pria yang bekerja sebesar 81,50 persen (BPS, 2017).

Timbangnya angka Wanita yang bekerja di Indonesia disebabkan justifikasi bahwa pekerjaan kalangan wanita yang cuma pada ruang yang sempit dan tidak jauh dari pekerjaan rumah tangga. Di kawasan perkotaan wanita mempunyai akses yang kecil dibanding dengan kalangan pria dalam memperoleh pekerjaan resmi (Todaro, 2011). Perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan penggalian, perusahaan pengadaan listrik serta gas, serta bisnis bangunan yang merupakan bisnis dengan kebutuhan pekerja yang besar masih di isi oleh dominan pria, sebaliknya wanita di Indonesia mendominasi sebagian zona yang produktivitasnya rendah jika dilihat dari nilai ekonominya seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi sehingga berakibat pada rendahnya tingkat upah wanita jika dibandingkan dengan pria (KPPPA, 2018).

Berikutnya, polemik wanita pula muncul di area kerja. Lahirnya ketidakadilan gender dan pengkondisian yang memiskinkan Wanita di ruang kerja merupakan akibat dari fenomena kebijakan yang tidak responsif terhadap gender. Kekerasan biologis terhadap buruh Wanita adalah salah satu akibat yang paling umum ditemui, hal ini merupakan akibat dari kebijakan yang mengesampingkan atau tidak responsive gender. Ancaman PHK yang menghantui Wanita yang mengajukan cuti haid dan hamil adalah fenomena kekerasan biologis yang paling gamblang (Pakasi, 2006).

Strategi pengarusutamaan gender harus dilakukan dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang lebih dikenal dengan singkatan PPRG sebagai sebuah alat untuk menanggulangi perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan bagi pria dan Wanita (Departemen Keuangan, 2019: 19). Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam upaya mewujudkan kesetaraan pria dan Wanita dalam ranah pembangunan negara yang menjangkau seluruh Lembaga pemerintah maupun swasta.

Forum *Voyage to Indonesia's Seminar on Women's Participation for Economic Inclusiveness* di Surabaya menghadirkan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyampaikan “*Di Kementerian Keuangan kami mau Wanita dan pria mendapatkan akses, control, partisipasi, dan manfaat seimbang dalam proses pembangunan. Selain itu kami mengupayakan system anggaran negara yang responsive terhadap gender*” (<https://www.liputan6.com>). Pernyataan itu dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 mengenai juknis dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) di Tahun Anggaran 2018. Pada lampiran PMK Nomor 94/PMK02/2017 memuat tahapan dalam Menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) dan tahapan pengerjaan Gender Budget Statement (GBS) di satuan kerja atau satker.

Ada beberapa daerah yang telah melaksanakan anggaran responsif gender saat menyusun kegiatan/program dalam membangun keadilan gender. Pada beberapa studi telah mengkaji penerapan anggaran yang responsif gender. Penelitian Khaerah dan Mutiarin (2016) menjelaskan fakta penelitian dimana tidak memadainya pengetahuan pejabat daerah di Dinas Kesehatan dalam melakukan Analisa tentang gender berakibat pada tidak mampunya menyelaraskan isu gender dalam tahapan menyusun anggaran yang memperhatikan gender di satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar..

Pada studi yang lain dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan, Bapemasper-KB, Dinas Kesehatan, dan Kesbangpolinmas sudah menjalankan anggaran responsif gender di Kota Semarang. Tapi, jumlah anggaran yang diporsikan tidak menunjukkan keberpihakan gender dalam komitmen anggarannya (Astuti, 2016). Hal ini dilihat dari minimnya anggaran untuk program pokok dalam mewujudkan kesetaraan kesetaraan.

BPS Kabupaten Sidenreng Rappang (2018) merilis jumlah pekerja wanita yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017 sebesar 116.485 orang dan total orang yang memiliki pekerjaan 183.531 orang, dimana angkatan kerja pria yaitu 342.317 orang dengan akumulasi yang memiliki pekerjaan 311.097 orang. Hal ini menunjukkan persentase Wanita yang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan pria. Dimana persentasinya 38,38 persen untuk wanita, sedangkan 72,90 persen untuk pria.

Bersumber pada informasi diatas, kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang jadi perkara terlebih bila dilihat pada sudut pandang gender hingga baik pria serta wanita masih memerlukan dorongan pemerintah daerah. Sehingga, judul yang hendak diangkat periset yakni “Potret Anggaran Responsif Gender dalam Menangani Kemiskinan” dimana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku objek riset.

METODE PENELITIAN

Fenomenologi dalam Akuntansi

Penting untuk mendorong penelitian kualitatif pada bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi (Chariri, 2009). Alasan pentingnya adalah, kajian ekonomi dan bisnis merupakan disiplin dan kajian yang bukan bebas nilai karena manajemen keuangan dan akuntansi merupakan realitas yang terbentuk secara social. Sehingga disiplin ilmu ini selalu dan akan beririsan dengan nilai-nilai budaya. hal ini juga yang menjadikan bidang ilmu manajemen keuangan dan akuntansi dapat digali dengan paradigma interpretative.

Paradigma interpretatif merupakan paradigma yang lazim digunakan dalam kajian akuntansi sebagai jalan dalam memahami konteks praktik profesional yang bersifat menyeluruh. Sehingga pengetahuan awal dapat diperoleh dengan efektif dari subyek yang diwawancarai menjadi sangat penting (Ludigdo, 2007). Metode ini dinilai sangat memperkhatikan kemanusiaan karena melakukan pendekatan metode pemahaman.

Fenomenologi merupakan salah satu paradigma interpretatif, dimana pengguna dari paradigm aini memungkinkan peneliti akuntansi dan manajemen keuangan tidak terikat oleh angka-angka, akun, dan proses laporan keuangan. Dengan kata lain, peneliti dapat menggali pemaknaan, pemahaman, kesadaran seseorang atas pengalamannya terkait manajemen keuangan dan akuntansi secara menyeluruh.

Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti akan memilih pejabat / aparatur yang merupakan aktor utama dalam Menyusun anggaran dan berpengalaman dibidang tersebut. Identitas informan yang dipilih akan menggunakan inisial dalam menggantikan nama informan yang sebenarnya. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Pejabat Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kehadiran Peneliti

Dalam pendekatan fenomenologi peneliti mengupayakan untuk melakukan epoche serta berusaha memahami fenomena yang bersumber dari subjek penelitian, dimana peneliti diketahui statusnya oleh subjek penelitian sebagai seorang pengamat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden yang diambil secara langsung selama proses penelitian. Sehingga, data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diolah oleh penulis dari hasil interaksi dengan responden.

Teknik Pengumpulan data

Digunakan dua metode dalam pengambilan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian dengan metode wawancara yang tidak terstruktur berdasarkan kategori tertentu dan tatap muka langsung.
2. Dokumentasi, melakukan pencatatan langsung atas dokumen ataupun berkas yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Fenomenologi Sanders merupakan rujukan sebagai Teknik analisis dalam penelitian ini, dimana tahapannya sebagai berikut :

1. Deskripsi fenomenologi
Deskripsi fenomenologi dapat dilakukan dengan membuat komentar atau catatan dari informan serta dapat disajikan dalam bentuk tabel jika diperlukan.
2. Identifikasi tema-tema
Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dapat dilakukan analisis fenomenologi berdasarkan pemetaan hasil interview dengan menggunakan intuisi dan subjektif peneliti dalam melihat sentralitas tema dari hasil wawancara.
3. Mengembangkan neotic/neomatic cerrolates
Menjelaskan persepsi subjektif peneliti baik reflektif maupun intuisi terhadap tema-tema pokok yang dipilih dalam tahapan reduksi fenomenologi, selanjutnya memberikan interpretasi dalam membentuk sintesis makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Neoma

1.1. Realitas Gender dan Anggaran Responsif Gender dalam Pahaman Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Penerapan kebijakan baru yang turun dari pemerintah pusat merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kondisi sumber daya pemerintah daerah yang belum siap dan sangat beragam berakibat pada implementasi kebijakan baru. Tidak terkecuali penerapan atau implementasi dari Anggaran Responsif Gender (ARG). Komitmen menjadi pondasi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap kebijakan baru yang ada. Komitmen terhadap ARG ini akan tercermin pada kebijakan dan anggaran suatu daerah. Komitmen saja tentu tidak bisa menjadi lokus kebijakan, tapi penting juga untuk di dukung oleh kemampuan SDM yang memadai.

Realitas implementasi kebijakan ARG di kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat ketidak jelasan tentang konsep ARG yang ditambah lagi dengan tidak adanya perda yang mengatur tentang hal tersebut. Sehingga, pentingnya penerapan kebijakan ARG masih belum disadari oleh berbagai pemangku kebijakan, seperti yang diungkapkan informan sebagai Berikut :

“....Butuh ki sebenarnya upaya lebih untuk mendorong instansi ini agar menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kalau saya mesti kompak dulu..mengerti bagaimana sebenarnya itu ARG. Sekarang belumpi ki bisa bergerak Bersama, karena tafsir ta tentang ini kebijakan masih berbeda-beda. Jadi perlu memang ini (ARG) dikonsolidasikan terus supaya dilihat penting ki. Untuk sementara kita bergerak sesuai pemahan kita saja dulu sembari kedepannya kita bisa menemukan role modelnya ini ARG”

Pemahaman SDM terkait gender juga sangat berpengaruh dalam menjalankan kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan suatu system penganggaran yang mengakomodir persoalan gender. Ketika peneliti mencoba menanyakan pemahaman gender dari Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, narasumber menjelaskan sebagai Berikut :

“....responsif gender kan bukan berarti persentasinya perempuan lebih banyak, dia harus adil kan. Responsif gender itu harus seimbang juga

antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ini konsep sederhananya, cuman rata-rata memang na Taunya begitu ji. Mana pekerjaan lain yang sudah banyak memang, jadi disini pelaksanaannya sebisanya saja”

Isu gender di lingkungan pekerjaan juga adalah hal yang penting untuk diuraikan, karena hal tersebut akan bertalian dengan penerapan kebijakan Anggaran Responsif Gender di satuan kerja. Saat peneliti menanyakan hal tersebut, jawaban responden seperti Berikut :

“...soal diskriminasi dalam pekerjaan contohnya, hak cuti bagi perempuan hamil kan rata-rata adaji cuman seringkali masih dibebankan pekerjaan administratif padahal kan harusnya cuti mi toh. Hal lainnya misalnya lowongan pekerjaan, seringkali memang banyak ki kaum laki-laki nyam au diterima disbanding perempuan dengan beberapa alasan misalnya kalua perempuan tidak bisai kerja berat dan begadang”

Gambaran diskursus gender yang dikemukakan narasumber diatas mengantarkan peneliti untuk menanyakan pokok permasalahan terkait anggaran responsif gender, dimana dalam pengakuan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkannya dalam berbagai kegiatannya. Seperti yang diuraikan dalam penjelasan informan :

“...begini ki, waktu kita susun konsep seperti pelatihan misalnya, pesertanya kita tentukan 100 orang. Dari peserta ini tidak di ambil ki 50:50, bukan dasar seimbang ini yang kami lihat untuk menentukan peserta laki-laki dan perempuan yang langsung ji dibagi dua dari tototal peserta. Tapi yang kami jadikan pertimbangan adalah berapakah sebenarnya itu Angkatan kerja laki-laki dan berapa Angkatan kerja perempuan. Kayak ki kemarin, ditemukan ternyata perbandingan dari data kami ada 60 % angkatan kerja laki-laki na perempuan ada ji 40%. Jadi inimi yang kami pakai untuk menentukan peserta pelatihan, 60 peserta laki-laki dan 40 peserta perempuan. Jadi bukan langsung dibagi dua saja toh”

Ada beberapa dokumen penunjang yang disiapkan lebih dulu dala menunjang penerapan kebijakan anggaran responsif gender ini seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), surat putusan focal poin dan GAP. Saat peneliti menanyakan proses pembuatan anggaran responsif gender, Berikut pemaparan narasumber :

“setelah anggaran ada baru kita bikinkan itu (ARG). Walaupun sebenarnya adami juga tercantum di output kegiatan karena haruski dijelaskan disitu toh. Tapi DPA belum pi tercantumkan, nanti setelah jadi DPA baru dibikinkan KAK untuk kegiatan teknisnyami, termasuk segini orangnya sama segini klasifikasi gendernya (jumlah laki-laki dan perempuan).”

1.2.Penerapan Anggaran Responsif Gender di Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Data pembuka wawasan merupakan pondasi dalam membuat GAP yang umumnya dilakukan oleh tim focal point yang dibentuk Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti kemudian menanyakan data pebuka wawasan tersebut. Berikut penjelasan narasumber :

“ada beberapa sebenarnya, termasuk dari dinas kami adaji. Ada data Sensus Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan serentak, untuk ini kami ambil datanya di BPS karena dia yang punya wewewngan soal sesus itu. Tapi untuk data terkait tentang itu memang kami banyak ambil dari BPS dan Bapenas juga.”

Dari penjelasan narasumber peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan tentang inisiatif dari Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendapatkan data yang mendalam tentang gender sebagai data pembuka wawasan, penjelasannya sebagai Berikut :

“kami punya data sendiri dengan mengembangkan data yang dari BPS juga. Tapi kan terkadang begini, ada mi data cuman kita butuh data yang lebih detail nya itu sehingga kami yang olah sendirimi itu data BPS dan sesuaikan apa yang kami butuhkan di dinas ini.cuman harus diakui je, kurang SDM ki memang dalam melakukan pengembangan data, jadi yang bisa dilakukan dimaksimalkan mami yang ada”

Dilihat dari dokumen anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menggunakan ARG hanya pada satu program dari empat program yang ada. Penulis menanyakan kenapa hanya dalam program tersebut penerapan system ARG diterapkan, Berikut penjelasan informan :

“...seharusnya kan memang semua program diterapkan itu (ARG), cuman kemarin kami maksimalkan dulu di satu kegiatan to’ ji karena dilihat dari fokusnya kegiatan bukan disitu targetnya Dinas kami sehingga system ini (ARG) hanya kami lakukan pada program yang kami di Dinas nilai sebagai program prioritas. Karena lumayan ribet juga untuk menyesuaikan itu disetiap program”

Peneliti selanjutnya menanyakan tentang berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

“bisa dibilang cukup kompleks kendala yang dihadapi kami ini, seperti misalnya mengenai data, inimi kendala mendasar ta sebenarnya. Karena data BPS yang kami ambil selama ini juga masih perlu ji di olah, na kemampuan staf disini yang masih belum bisa mengola data sekunder itu untuk keperluan di dinas. Yang berikutnya kalua saya adalah focal point, kan tidak semuanya pejabat sebenarnya toh, orang tertentu ji yang tau itu.misalnya seperti saya yang kebetulan orang perencanaan, tap ikan kalua mau dilihat yang terlibat langsung kan orang yang bagian Teknik kan. Kalau memang ada, juga tidak terlalu na paham ji juga tentang gender. Kalua data terpilah sudah selesai mi diwilayah itu, cuman kan gender bukan persoalan itu saja toh.”

2. Neosis

2.1.Sikap Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam penerapan Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) dimaknai sebagai mekanisme anggaran yang mengakomodir keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, control, dan pengambilan keputusan, serta memiliki kesempatan untuk merasakan hasil pembangunan (KPPPA, 2010). Beberapa syarat yang dipenuhi dalam Menyusun ARG ini yaitu (1) Komitmen dari pengambil kebijakan termasuk anggota parlemen yang Menyusun undang-undang, (2) Tersedianya data terpilih per sektor yang diperbarui secara rutin dan berkala, (3) Tersedianya alat dan panduan dalam merencanakan program begitupun dengan

anggaran dalam membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender, (4) Pemantauan dan evaluasi kinerja terkait kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan berkurangnya kesenjangan ataupun tercapainya kesetaraan gender.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Edward tentang faktor yang menjadi masalah serta landasan proses efektif dari implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Maka penting untuk melihat sikap birokrasi dalam menerapkan kebijakan anggaran responsif gender di Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Ikhtiar ini bertujuan untuk memahami apa yang ada dibalik anggaran atau neosis yang mana manusia menjadi subjek penelitian. Hal ini bisa dimaknai bahwa pentingnya memahami sisi manusia sebagai pelaku dalam penelitian akuntansi (Syarifuddin, 2011).

Travers, Gagne, dan Cronbach merumuskan tiga komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sikap ; komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen behavior (Ahmadi, 2009). Komponen kognitif meliputi pengetahuan, kepercayaan, pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Komponen afektif meliputi emosi dari sikap. Adapun Komponen Behavior mengacu pada predisposisi dalam bertindak yang dipengaruhi oleh komponen kognitif.

Noema menunjukkan tingkat pemahaman apratur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pentingnya menerapkan system Anggaran Responsif Gender (ARG) lebih dipengaruhi dari mekanisme kebijakan yang mengkondisikan hal tersebut melalui undang-undang dan merupakan hasil rapat dari berbagai dinas dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai penyampai informasinya. Selain itu terdapat juga neoma yang menunjukkan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menilai bahwa pengarus utamaan gender bukan menjadi program prioritas dari Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini termasuk pada bidang ketenagakerjaan. Sehingga usaha dalam membangun keadilan gender tidak menjadi perhatian dari Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga berarti bahwa pihak dinas tidak menjadi komponen afektif atau neosis.

Pemahaman Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tentang keadilan gender yang merupakan upaya dalam membangun kedudukan yang proporsional pada aspek penempatan kerja dijadikan landasan dalam mengidentifikasi isu gender dalam lingkungan kerja Dinas tersebut. Pemahaman ini menjadi komponen kognitif yang selanjutnya menjadi komponen behavior Dinas Koperasi, UMKM,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Komponen biheviior ditunjukkan pada saat Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang membuat anggaran responsif gender pada tahun 2020 pada program pelatihan tenaga kerja.

Aspek tersebut selajunta menjadi dasar dalam memandang gambaran sikap Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menjadi neosis dari sisi psikologis yang melatarbelakangi rangkaian Tindakan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sejauh ini dalam menyusun Anggaran Responsif Gender.

2.2.Fakta Sosial dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Fakta social merupakan struktur yang bersifat eksternal dan mengkondisikan individu membuat Tindakan-tindakan social. Durkheim membagi fakta social menjadi dua tipe ; material dan nonmaterial. Fakta social yang bersifat material adalah sesuatu yang dapat diamati dan diobservasi, misalnya hukum suatu masyarakat. Fakta social nonmaterial merupakan sesuatu yang bersifat internal dalam diri individu atau inter subjective, termasuk didalamnya yakni opini dan moralitas kolektif (Ritzer, 2004).

Komponen sikap yang telah dibahas sebelumnya merupakan neosis dari sisi psikologis dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan fakta social seperti apa yang memiliki peran mengkondisikan aktor dalam melakukan Tindakan social dan pada akhirnya menjadi neosis dari sosiologis. Komponen kognitif mengenai pentingnya anggaran responsif gender karena merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan lain, memberikan pemaknaan fakta social yang bersifat materil dalam penerapan ARG. Disisi lain, pentingnya menerapkan Anggaran Responsif Gender dalam mewujudkan keadilan berbasis gender merupakan fakta social yang bersifat nonmaterial dalam penerapan ARG.

Berikutnya penting untuk melakukan analisis lebih tentang fakta social apa yang berperan dominan dalam memaksa aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menerapkan anggaran responsif gender. Saat peneliti menanyakan inisiatif dalam penerapan AGR, pihak dinas cenderung menunggu hasil rapat koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itu digambarkan dalam neoma :

“.....kebijakan itu saya dengar 2020, sejauh ini belumpi juga kumpul, rapat koordinasi saja juga belumpi. Rencananya justru saya dengar baru tahun ini, itupun belum ada kepastian. Mungkin hanya di program yang prioritas ji saja dulu, karena kalau ke semua sepertinya berat ki.”

Narasumber Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengutarakan bahwa anggaran responsif gender ini bukan merupakan hal prioritas dari Visi-misi Bupati Sidenreng Rappang saat ini. Hal ini digambarkan pada neoma :

“...sebenarnya dulu pas keluar anggaran agak susah ki untuk membuat itu (ARG), karena di proses penyusunan bukan hanya itu ka yang dilihat. Justru akan lebih banyak dibahas pas penyusunan anggaran, justru program prioritas dari visi-misinya Bupati yang dibahas banyak.”

Untuk melihat fakta social nonmaterial, peneliti menganalisis moralitas kolektif Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membangun dan mewujudkan keadilan gender. Anggaran responsif gender (ARG) dapan beerjalan efektif dan efisien dengan memetakan peran perempuan dan laki-laki, kondisi laki-laki dan perempuan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki. salah satu yang dapat mendukung hal ini adalah dengan ikut melibatkan masyarakat dalam focal point untuk Menyusun data pembuka wawasan sehingga tersedia data yang bersifat objektif (Kebijakan et al., 2017).

Dalam hal Menyusun data pembuka wawasan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan neoma dimana hanya pihak dinas yang melakukan penyusunan tersebut. Sumber data pun masih didominasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga keragaman data hamper tidak ada dan bersifat monoton serta perlu diolah lebih lanjut. Apartur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan kondisi Sumber Daya Manusia yang dimilikinya merupakan kendala tersendiri dalam memahami isu gender dan mengembangkan data yang dibutuhkan terkait gender.

Hal ini menunjukkan dominasi dari fakta social material (neosis) yang memaksa aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapan ARG. Dominannya peran instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017, serta keputusan rapat

koordinasi lintas dinas Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan stimulus Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (AGR). Rendahnya fakta social yang bersifat nonmaterial ini dinilai sebagai akibat dari system yang diadopsi sejak lama yaitu pengkhususan tenaga kerja pasca revolusi industry di eropa (Ritzer, 2004).

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada dua neosis yang menjadi sebab fenomena anggaran responsif gender dalam penanggulangan kemiskinan baik secara psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, perilaku birokrasi dalam menerapkan anggaran responsif gender di Dinas Koperasi,UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ada terbagi dalam tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen behavior. Dalam benak Dinas Koperasi,UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang komponen kognitif dibangun oleh pemahaman bahwa anggaran anggaran responsif gender (ARG) adalah amanat undang-undang Berikut peraturan yang mengikutinya demi mewujudkan keadilan gender dan juga sebagai hasil rapat koordinasi lintas dinas yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemahaman lainnya yaitu ARG sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan gender, dimana keadilan disini dimaknai sebagai suatu yang sama dan proporsional. Komponen afektif yang terbangun adalah kecenderungan untuk mengesampingkan ARG karena dinilai sebagai sesuatu yang tidak berada dalam mekanisme prioritas dari visi-misi Bupati Sidenreng Rappang saat ini. Hal itu kemudian membentuk komponen behavior dimana penerapan ARG telah berjalan disebagian kegiatan dari hasil rapat koordinasi lintas dinas Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara sosiologis, Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Dinas Koperasi,UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang distimulus oleh fakta social material. Fakta social material yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 94/PMK.02/2017 dan hasil rapat koordinasi dari berbagai dinas yang dprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Stimulus dari fakta social material ini yang menjadi sebab diterapkannya ARG di Dinas Koperasi,UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang walaupun penerapannya hanya ada pada satu program prioritas dinas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, R.R. dan Hadi, A., 2017. Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), pp.132-161.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2001. *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta
- Badan Pusat Statistika Kota Makassar., 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2017*. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistika Kota Makassar., 2018. *Kota Makassar dalam Angka, Makassar Municipality in figure 2018*. Makassar: Badan Pusat Statistika Kota Makassar.
- Chariri, A., 2009. *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*. Materi Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Denzin, K. N dan Lincoln, Y. S., 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit.
- Hasbiansyah, O.J.M.J.K., 2008. Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), pp.163-180.
- Fakih, M., 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cetakan Kelima Belas)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, S.I., 2018. Anggaran responsif gender sebagai suatu instrumen negara untuk pemenuhan hak perempuan di Indonesia. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), pp.67-86.
- Kementerian Keuangan., 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., 2018. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta.
- Khaerah, N. and Mutiarin, D., 2016. Integrasi anggaran responsif gender dalam anggaran pendapatan belanja daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), pp.413-445.
- Kuncoro, M., 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kuswarno, E., 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Aplikasinya*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Liufeto, A.M. and Angi, Y.F., 2019. Anggaran Responsif Gender pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(2), pp.99-110.
- Ludigo, U., 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mu'ammad, M.N., 2017. Analisis Fenomenologi Terhadap Makna dan Realita. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(1), pp.120-135.
- Mulawarman, A.D., 2013. From Phenomenology Toward Post and Hyper Phenomenology. *Accounting Research Training Series*, 4.

- Nugrahanti, Y.W., 2017. Membingkai Penelitian Akuntansi Keuangan dalam Bingkai Interpretif-Fenomenologi dengan Konteks Budaya dan Kearifan Lokal Indonesia. *Makalah ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XX. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jember*, pp.27-30.
- Nurhaeni, I.D.A. and Sugandra, C., 2014. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).
- Octaria, D., 2015. Analisis Anggaran Responsif Gender Sebagai Percepatan. 9(1): 481–92.
- Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D.T., Aripurnama, S. and Hodijah, S.N., 2006. *Potret kemiskinan perempuan*. Women Research Institute.
- S. Chandrasekhar, F.R.S., and jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto., 2020. “Implementasi Anggaran Responsif Gender Kota Pekalongan.” *Liquid Crystals*. 21(1), pp. 1–17.
- Syarifuddin., 2016. Dramaturgy of Gender Responsive Budgeting: Concept or Reality?. *Ijaber*, 14, pp. 9273-9282.
- Syarifuddin. 2011. Konstruksi Kebijakan Anggarasn: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *Ekuitas*, 15, pp. 307-331.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C., 2011. *Pembangunan Ekonom (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.